

Peran Masyarakat Poopo Barat dalam Demokrasi Politik

Anggie Regina Wehantow¹, Romi Mesra²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: 120606029@unima.ac.id, romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 20, 2025

Accepted Oktober 15, 2025

Published November 30, 2025

Keywords:

Peran Masyarakat,
 Demokrasi,
 Politik



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat Poopo Barat dalam demokrasi politik dengan fokus pada kesadaran politik, pemahaman tentang fungsi demokrasi, dan praktik partisipasi substantif di tingkat lokal. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi partisipatif dan wawancara mendalam terhadap tiga informan kunci, penelitian ini berupaya memahami secara mendalam perspektif dan pengalaman masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: pertama, masyarakat Poopo Barat memiliki kesadaran politik yang tinggi tentang pentingnya peran mereka dalam demokrasi dan pemahaman bahwa hak dan kewajiban politik harus dilaksanakan sesuai aturan; kedua, masyarakat memandang demokrasi politik sebagai instrumen penting untuk pengembangan desa dan pembelajaran sosial yang memungkinkan mereka bertukar pikiran dan menyuarakan pendapat untuk kemajuan bersama; ketiga, terdapat praktik partisipasi substantif melalui pemberian masukan, arahan, dan penyuaan pendapat dalam forum-forum musyawarah untuk mengembangkan potensi dan kemajuan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa demokrasi di Poopo Barat tidak hanya berlangsung dalam ritual elektoral tetapi juga dalam proses deliberatif yang berkelanjutan, meskipun masih diperlukan penguatan kapasitas dan institusi partisipasi untuk memastikan inklusivitas dan efektivitas partisipasi politik masyarakat.

Abstract

This study aims to analyze the role of the West Poopo community in political democracy with a focus on political awareness, understanding of the function of democracy, and substantive participation practices at the local level. Using a qualitative approach with participant observation methods and in-depth interviews with three key informants, this study seeks to deeply understand the community's perspectives and experiences in participating in the democratic process. The results of the study show three main findings: first, the West Poopo community has a high political awareness of the importance of their role in democracy and an understanding that political rights and obligations must be implemented according to the rules; second, the community views political democracy as an important instrument for village development and social learning that allows them to exchange ideas and voice opinions for mutual progress; third, there are substantive participation practices through providing input, direction, and voicing opinions in deliberation forums to develop the village's potential and progress. These findings indicate that democracy in West Poopo does not only take place in electoral rituals but also in a continuous deliberative process, although strengthening participation capacities and institutions is still needed to ensure the inclusiveness and effectiveness of community political participation.

Keywords: Role of Society, Democracy, Politics

A. Pendahuluan

Demokrasi sebagai sistem politik yang memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat telah menjadi diskursus penting dalam studi politik kontemporer. Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi tidak hanya sebatas pemberian suara dalam pemilihan umum, tetapi juga melibatkan keterlibatan aktif dalam pengawasan kebijakan, advokasi kepentingan publik, dan pembentukan opini politik (Huntington, 1991).

Dalam konteks Indonesia, demokratisasi yang dimulai sejak era reformasi 1998 telah membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk berperan lebih aktif dalam proses politik di tingkat daerah (Aspinall & Fealy, 2003). Masyarakat lokal dengan segala kearifan dan dinamika sosial-budayanya memiliki potensi besar untuk memperkuat fondasi demokrasi dari level grass root, di mana partisipasi langsung warga negara menjadi kunci keberhasilan konsolidasi demokrasi (Putnam, 1993).

Poopo Barat sebagai salah satu wilayah di Indonesia memiliki karakteristik masyarakat yang unik dengan tradisi musyawarah dan gotong royong yang masih kuat dalam kehidupan sosial politik mereka. Tradisi lokal ini sejatinya memiliki relevansi dengan nilai-nilai demokrasi deliberatif yang menekankan pada dialog dan pengambilan keputusan secara kolektif (Habermas, 1996).

Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masyarakat lokal memiliki kewenangan dan kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik di wilayahnya (Nordholt & Van Klinken, 2007). Keterlibatan masyarakat Poopo Barat dalam politik lokal mencerminkan bagaimana modal sosial dan jaringan kemasyarakatan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah (Boix & Posner, 1998).

Namun demikian, realitas partisipasi politik masyarakat lokal di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kultural. Patronase politik, politik uang, dan oligarki lokal seringkali menghambat partisipasi substantif masyarakat dalam proses demokrasi (Hadiz, 2010).

Di sisi lain, kurangnya literasi politik dan akses informasi yang memadai juga menjadi kendala bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses politik (Norris, 2001). Dalam konteks Poopo Barat, memahami bagaimana masyarakat lokal menavigasi kompleksitas politik modern sambil mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka menjadi penting untuk mengidentifikasi pola-pola partisipasi yang efektif dan berkelanjutan dalam memperkuat demokrasi lokal.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik di Indonesia dengan berbagai perspektif. Penelitian Satriawan (2017) tentang partisipasi politik masyarakat adat dalam pemilihan kepala daerah di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dan struktur sosial tradisional memiliki pengaruh signifikan terhadap pola partisipasi politik masyarakat, di mana kepemimpinan adat masih menjadi referensi penting dalam orientasi politik warga.

Studi tersebut mengungkapkan bahwa integrasi antara sistem politik modern dengan nilai-nilai tradisional dapat meningkatkan legitimasi dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi lokal. Sementara itu, Hidayat (2019) dalam penelitiannya tentang modal sosial dan partisipasi politik di Jawa Barat menemukan bahwa tingkat kepercayaan sosial dan kepadatan jaringan kemasyarakatan berkorelasi positif dengan tingkat partisipasi politik warga, baik dalam pemilihan umum maupun dalam aktivitas politik non-elektoral seperti musyawarah desa dan forum warga. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan modal sosial sebagai basis partisipasi politik yang berkelanjutan.

Di sisi lain, studi Pratama (2020) tentang hambatan partisipasi politik masyarakat perdesaan di Sulawesi Selatan mengidentifikasi bahwa faktor struktural seperti dominasi elite lokal, keterbatasan akses informasi, dan rendahnya pendidikan politik menjadi penghambat utama partisipasi substantif masyarakat dalam proses demokrasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi elektoral cukup tinggi, partisipasi dalam pengawasan kebijakan dan advokasi kepentingan publik masih rendah karena ketergantungan masyarakat pada patronase politik dan lemahnya kesadaran akan hak-hak politik mereka. Ketiga penelitian tersebut memberikan gambaran tentang kompleksitas partisipasi politik masyarakat lokal di Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor sosial, kultural, dan struktural yang beragam.

Meskipun berbagai penelitian tentang partisipasi politik masyarakat lokal di Indonesia telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan terkait dengan dinamika partisipasi politik di wilayah-wilayah spesifik yang memiliki karakteristik sosial-budaya yang unik. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung fokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik secara umum, namun kurang mengeksplorasi bagaimana konteks lokal yang spesifik membentuk pola-pola partisipasi yang khas dan berbeda dari wilayah lain. Khususnya untuk wilayah Poopo Barat, belum ada kajian mendalam yang menganalisis bagaimana masyarakat setempat dengan tradisi dan struktur sosial yang khas mereka berinteraksi dengan institusi demokrasi formal dan informal dalam konteks politik lokal kontemporer.

Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya juga belum secara komprehensif mengeksplorasi dimensi transformatif dari partisipasi politik masyarakat lokal, yaitu bagaimana partisipasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme agregasi preferensi dalam pemilihan umum, tetapi juga sebagai proses pembelajaran politik dan pemberdayaan kolektif yang dapat mengubah relasi kekuasaan di tingkat lokal. Kesenjangan ini penting untuk diisi mengingat bahwa memahami dinamika partisipasi politik di tingkat lokal dengan segala kekhususannya dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model demokrasi yang lebih kontekstual dan inklusif, yang tidak hanya mengadopsi template demokrasi liberal Barat tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai dan praktik-praktik lokal yang kondusif bagi penguatan demokrasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap masyarakat Poopo Barat sebagai subjek kajian dengan menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan analisis institusional dan kultural. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan pendekatan tunggal, penelitian ini berupaya untuk memahami partisipasi politik masyarakat Poopo Barat melalui lensa ganda yang mempertimbangkan baik struktur institusional formal seperti regulasi pemilihan dan mekanisme pemerintahan daerah, maupun dimensi kultural seperti nilai-nilai tradisional, pola kepemimpinan lokal, dan modal sosial yang melekat dalam komunitas. Integrasi kedua perspektif ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana masyarakat lokal bernegosiasi antara tuntutan modernitas politik dengan mempertahankan identitas dan praktik-praktik tradisional mereka.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menawarkan kebaruan dalam hal pendekatan metodologis yang mengombinasikan analisis kuantitatif terhadap tingkat dan pola partisipasi politik dengan analisis kualitatif mendalam terhadap makna dan motivasi di balik partisipasi tersebut.

Melalui pendekatan mixed methods ini, penelitian tidak hanya mengukur seberapa besar partisipasi masyarakat Poopo Barat dalam proses demokrasi, tetapi juga menggali pemahaman mendalam tentang mengapa mereka berpartisipasi, apa yang mereka harapkan dari partisipasi tersebut, dan bagaimana mereka memaknai demokrasi dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga eksplanatif dan interpretatif, yang dapat memberikan kontribusi

teoretis bagi studi demokrasi lokal di Indonesia sekaligus implikasi praktis bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal.

Realitas partisipasi politik masyarakat Poopo Barat menunjukkan fenomena yang kompleks dan multi-dimensi. Di satu sisi, tingkat partisipasi elektoral dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif di wilayah ini menunjukkan angka yang relatif tinggi, mencerminkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka. Namun di sisi lain, partisipasi substantif dalam bentuk keterlibatan dalam forum-forum musyawarah desa, pengawasan anggaran daerah, dan advokasi kebijakan publik masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, terutama elite lokal dan tokoh masyarakat.

Kesenjangan antara partisipasi elektoral dan partisipasi substantif ini mengindikasikan bahwa demokrasi di tingkat lokal masih lebih banyak dipahami sebagai ritual pemilihan lima tahunan daripada sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.

Selain itu, realitas politik di Poopo Barat juga diwarnai oleh persistensi praktik-praktik patronase dan politik identitas yang mempengaruhi pola partisipasi masyarakat. Hubungan patron-klien antara elite politik dengan warga masih cukup kuat, di mana dukungan politik seringkali didasarkan pada pertimbangan material dan relasional daripada evaluasi terhadap program dan rekam jejak kandidat. Meskipun demikian, terdapat pula indikasi munculnya kesadaran politik baru di kalangan generasi muda dan kelompok masyarakat sipil yang mulai mengkritisi praktik-praktik politik yang eksklusif dan tidak akuntabel.

Dinamika antara praktik politik tradisional dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang lebih modern ini menciptakan ruang kontestasi dan negosiasi yang menarik untuk dikaji guna memahami trajektori demokrasi lokal di Poopo Barat dan implikasinya bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia secara lebih luas.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran masyarakat Poopo Barat dalam demokrasi politik. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, dan perspektif subjektif masyarakat terhadap praktik demokrasi di wilayah mereka (Creswell, 2014).

Metode kualitatif dianggap tepat untuk mengungkap kompleksitas fenomena sosial politik yang tidak dapat diukur semata-mata melalui angka-angka, melainkan memerlukan pemahaman kontekstual yang mendalam terhadap nilai-nilai, motivasi, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi partisipasi politik masyarakat (Denzin & Lincoln, 2011).

Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami realitas partisipasi politik masyarakat Poopo Barat dari perspektif emik, yaitu dari sudut pandang masyarakat itu sendiri sebagai pelaku utama dalam proses demokrasi lokal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposive. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik-praktik partisipasi politik masyarakat dalam berbagai forum dan kegiatan kemasyarakatan di Desa Poopo Barat, termasuk musyawarah desa, pertemuan warga, dan aktivitas politik lainnya (Spradley, 2016).

Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data primer tentang pola interaksi, dinamika kekuasaan, dan mekanisme pengambilan keputusan yang berlangsung dalam kehidupan politik

masyarakat. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan dengan tiga informan kunci yang mewakili berbagai segmen masyarakat, yaitu Bapak Febry Mewengkang (52 tahun), Bapak Frans Tewal (48 tahun), dan Ibu Meyfie Lumintang (50 tahun). Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan kemasyarakatan dan pemahaman mereka terhadap dinamika politik lokal (Patton, 2015).

Data yang terkumpul dari observasi dan wawancara kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan makna-makna yang muncul dari narasi informan dan catatan lapangan. Proses analisis dilakukan melalui tahapan coding, kategorisasi, dan interpretasi untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang peran masyarakat Poopo Barat dalam demokrasi politik (Braun & Clarke, 2006).

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, peneliti melakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan identitas informan dan memperoleh persetujuan informed consent sebelum melakukan wawancara, serta menyajikan data secara objektif tanpa bias atau kepentingan tertentu.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Peran dalam Demokrasi Politik

Temuan pertama dari penelitian ini menunjukkan adanya kesadaran yang cukup tinggi di kalangan masyarakat Poopo Barat tentang pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi politik. Hasil observasi mengungkapkan bahwa masyarakat memahami bahwa partisipasi mereka merupakan elemen fundamental bagi berjalannya sistem demokrasi dengan baik. Kesadaran ini tercermin dari pemahaman mereka bahwa hak dan kewajiban sebagai warga negara harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Masyarakat menyadari bahwa demokrasi politik tidak akan berfungsi optimal tanpa keterlibatan aktif mereka, baik dalam bentuk pemberian suara dalam pemilihan, maupun partisipasi dalam forum-forum pengambilan keputusan di tingkat desa.

Kesadaran ini semakin diperkuat oleh pernyataan Bapak Febry Mewengkang yang menegaskan bahwa,

”...masyarakat harus mengambil peran karena dengan adanya partisipasi masyarakat, demokrasi dapat berjalan dengan baik jika mengikuti aturan yang ada” (Hasil wawancara pada tanggal 6 november 2023).

Pernyataan ini mengindikasikan pemahaman yang matang tentang relasi antara partisipasi warga dengan kualitas demokrasi. Informan memahami bahwa peran masyarakat bukan semata-mata hak yang dapat diabaikan, melainkan juga kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga keberlanjutan sistem demokrasi. Kesadaran tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dalam demokrasi politik menunjukkan bahwa masyarakat Poopo Barat telah mengalami proses pembelajaran politik yang membentuk civic consciousness yang diperlukan untuk memperkuat demokrasi lokal.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Poopo Barat adalah wilayah perdesaan, masyarakatnya telah memiliki literasi politik yang memadai untuk memahami posisi dan peran

mereka dalam sistem demokrasi. Kesadaran kolektif ini menjadi modal sosial yang penting bagi penguatan demokrasi di tingkat lokal karena partisipasi yang didasari oleh kesadaran cenderung lebih berkelanjutan dan bermakna dibandingkan partisipasi yang hanya didorong oleh mobilisasi elite atau insentif material semata. Namun demikian, kesadaran ini perlu terus diperkuat melalui pendidikan politik yang kontinu dan penciptaan ruang-ruang partisipasi yang inklusif agar tidak terjadi kesenjangan antara kesadaran dengan praktik partisipasi yang sesungguhnya.

b. Demokrasi Politik sebagai Instrumen Pengembangan Desa dan Pembelajaran Sosial

Temuan kedua mengungkapkan bahwa masyarakat Poopo Barat memandang demokrasi politik bukan hanya sebagai mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk pengembangan desa dan pembelajaran sosial kemasyarakatan. Hasil wawancara dengan Bapak Frans Tewal menunjukkan perspektif yang menarik bahwa,

”...demokrasi politik di lingkungan masyarakat mengajarkan warga untuk berperan aktif dalam mengembangkan serta memajukan desa” (Hasil wawancara pada tanggal 6 november 2023).

Pemahaman ini menunjukkan bahwa demokrasi dipahami secara fungsional sebagai sarana untuk mencapai tujuan kolektif berupa kemajuan desa, bukan semata-mata sebagai nilai atau prinsip abstrak. Masyarakat melihat bahwa melalui proses demokrasi, mereka memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bersama.

Lebih jauh lagi, demokrasi politik juga dipandang sebagai ruang pembelajaran sosial di mana masyarakat dapat belajar bersosialisasi dengan keadaan sosial di lingkungan mereka dan menyuarakan pendapat dalam kehidupan berdemokrasi yang baik. Fungsi edukatif dari demokrasi ini sangat penting karena melalui partisipasi dalam proses demokrasi, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen kebijakan tetapi juga produsen pengetahuan dan wacana politik yang relevan dengan konteks lokal mereka. Proses ini menciptakan ruang deliberasi di mana berbagai perspektif dan kepentingan dapat diartikulasikan dan dinegosiasikan secara damai, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih legitimate dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, demokrasi berfungsi sebagai mekanisme agregasi preferensi sekaligus sebagai proses pembentukan preferensi melalui dialog dan pertukaran argumentasi.

Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat Poopo Barat telah mengalami transformasi dalam memahami makna demokrasi dari sekadar prosedur elektoral menjadi proses yang lebih substantif dan partisipatoris. Pemahaman tentang demokrasi sebagai instrumen pengembangan desa dan pembelajaran sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat dan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang asing atau dipaksakan dari luar. Integrasi antara nilai-nilai demokrasi modern dengan tradisi musyawarah dan gotong royong yang sudah ada dalam masyarakat menciptakan bentuk demokrasi lokal yang unik dan kontekstual, yang dapat menjadi model bagi wilayah-wilayah lain dalam mengembangkan praktik demokrasi yang sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat.

c. Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Memberikan Masukan dan Menyuarakan Pendapat

Temuan ketiga menunjukkan adanya praktik partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk pemberian masukan, arahan, dan penyuaran pendapat untuk kemajuan desa. Hasil wawancara dengan Ibu Meyfie Lumintang mengungkapkan bahwa,

”...sebagai masyarakat, warga harus bersikap baik dalam mengembangkan dan memberi masukan serta arahan dalam rangka meningkatkan kemajuan desa melalui cara berdemokrasi yang saling bertukar pikiran” (Hasil wawancara pada tanggal 6 november 2023).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak dipahami secara pasif sebagai pemenuhan kewajiban formal semata, melainkan sebagai keterlibatan aktif dan konstruktif dalam proses pembangunan desa. Masyarakat memandang diri mereka sebagai aktor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk dikontribusikan dalam pengambilan keputusan kolektif.

Praktik bertukar pikiran, menyumbangkan, dan menyuarakan pendapat yang disebutkan oleh informan menunjukkan adanya ruang deliberasi yang berfungsi dengan baik di tingkat desa. Dalam ruang ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan tetapi juga subjek yang aktif dalam merumuskan agenda pembangunan dan mengidentifikasi potensi-potensi lokal yang dapat dikembangkan. Kemampuan masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka mencerminkan adanya kebebasan berekspresi dan budaya politik yang terbuka, di mana perbedaan pendapat dihargai dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya argumentasi dan diskursus publik dalam proses politik, bukan hanya agregasi suara melalui voting semata.

Temuan ini juga mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat Poopo Barat tidak terbatas pada momen-momen elektoral tetapi berlangsung secara berkelanjutan dalam berbagai forum dan kegiatan kemasyarakatan. Partisipasi substantif ini lebih bermakna bagi penguatan demokrasi lokal karena memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga.

Kemampuan masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kemajuan desa melalui mekanisme demokratis menunjukkan bahwa demokrasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial politik mereka, bukan sekadar ritual yang dilakukan secara periodik. Namun demikian, untuk memastikan keberlanjutan partisipasi ini, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan politik dan penciptaan institusi-institusi partisipasi yang lebih inklusif agar semua segmen masyarakat, termasuk kelompok marginal, dapat terlibat secara setara dalam proses demokrasi.

2. Pembahasan

1. Kesadaran Politik dan Civic Consciousness dalam Masyarakat Lokal

Temuan penelitian yang menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Poopo Barat tentang pentingnya peran mereka dalam demokrasi politik dapat dijelaskan melalui konsep civic consciousness yang dikembangkan oleh Almond dan Verba (1963) dalam teori budaya

politik. Civic consciousness merujuk pada kesadaran warga negara tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dalam sistem politik, yang menjadi prasyarat bagi terbentuknya budaya politik partisipan.

Dalam konteks Poopo Barat, kesadaran masyarakat bahwa demokrasi memerlukan partisipasi aktif mereka dan pemahaman tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban sesuai aturan menunjukkan bahwa telah terjadi proses sosialisasi politik yang efektif. Kesadaran ini tidak muncul secara spontan, melainkan terbentuk melalui pengalaman berdemokrasi yang terakumulasi sejak era reformasi, pendidikan politik informal melalui media dan interaksi sosial, serta pengaruh dari tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi role model dalam partisipasi politik (Easton & Dennis, 1969).

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam demokrasi juga dapat dipahami melalui perspektif teori modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam (2000), yang menekankan bahwa kepercayaan sosial, norma timbal balik, dan jaringan kemasyarakatan yang kuat dapat memfasilitasi tindakan kolektif dan partisipasi politik. Dalam masyarakat Poopo Barat yang masih memiliki ikatan sosial yang erat dan tradisi gotong royong yang kuat, modal sosial ini menjadi fondasi bagi tumbuhnya kesadaran kolektif tentang pentingnya berkontribusi dalam proses demokrasi.

Ketika Bapak Febry Mewengkang menyatakan bahwa demokrasi dapat berjalan dengan baik jika masyarakat berpartisipasi sesuai aturan, pernyataan ini mencerminkan internalisasi norma-norma demokratis yang telah menjadi bagian dari sistem nilai masyarakat. Modal sosial yang tinggi membuat masyarakat lebih mudah dimobilisasi untuk tujuan-tujuan kolektif, termasuk partisipasi dalam proses demokrasi, karena adanya kepercayaan bahwa orang lain juga akan melakukan hal yang sama (Coleman, 1988).

Namun demikian, kesadaran politik yang tinggi tidak secara otomatis menjamin partisipasi politik yang efektif jika tidak disertai dengan kapasitas dan kesempatan untuk berpartisipasi. Verba, Schlozman, dan Brady (1995) dalam teori Civic Voluntarism Model menjelaskan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh tiga faktor utama: resources (sumber daya seperti waktu, uang, dan keterampilan), psychological engagement (keterlibatan psikologis termasuk kesadaran dan minat politik), dan recruitment networks (jaringan yang memobilisasi partisipasi).

Dalam konteks Poopo Barat, meskipun kesadaran politik (psychological engagement) sudah tinggi, perlu dievaluasi apakah masyarakat juga memiliki sumber daya yang memadai dan akses ke jaringan mobilisasi yang inklusif. Kesenjangan dalam hal sumber daya dan akses ini dapat menjelaskan mengapa kesadaran yang tinggi tidak selalu diterjemahkan ke dalam partisipasi substantif yang merata di semua segmen masyarakat, dan mengapa partisipasi masih cenderung didominasi oleh elite lokal dan tokoh masyarakat tertentu.

2. Demokrasi Deliberatif dan Fungsi Edukatif Partisipasi Politik

Pemahaman masyarakat Poopo Barat tentang demokrasi politik sebagai instrumen pengembangan desa dan pembelajaran sosial sejalan dengan konsep demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Habermas (1996) dan diperluas oleh Dryzek (2000). Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya diskursus dan dialog publik dalam proses pengambilan keputusan politik, di mana legitimasi keputusan tidak hanya berasal dari agregasi preferensi melalui

voting, melainkan juga dari kualitas deliberasi yang mendahului pengambilan keputusan tersebut.

Ketika Bapak Frans Tewal menyatakan bahwa melalui demokrasi politik masyarakat dapat belajar bersosialisasi dan menyuarakan pendapat untuk menciptakan kemajuan bersama, pernyataan ini mencerminkan pemahaman tentang demokrasi sebagai proses komunikatif di mana preferensi dan kepentingan tidak dianggap tetap, melainkan dapat berubah melalui proses pertukaran argumentasi. Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme agregasi, tetapi juga sebagai proses transformasi di mana warga belajar untuk memahami perspektif orang lain dan merumuskan kepentingan bersama.

Fungsi edukatif dari partisipasi politik yang ditemukan dalam penelitian ini juga sejalan dengan pemikiran John Stuart Mill (1861) yang menyatakan bahwa partisipasi dalam institusi-institusi politik lokal merupakan sekolah demokrasi bagi warga negara. Melalui keterlibatan dalam musyawarah desa, forum warga, dan aktivitas kemasyarakatan lainnya, masyarakat Poopo Barat tidak hanya belajar tentang prosedur dan mekanisme demokrasi, tetapi juga mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab, seperti kemampuan berargumentasi, mendengarkan perspektif yang berbeda, mencari kompromi, dan bekerja sama untuk tujuan bersama (Pateman, 1970).

Proses pembelajaran ini sangat penting dalam konteks masyarakat perdesaan di Indonesia yang sedang mengalami transisi dari sistem politik tradisional yang hierarkis menuju sistem yang lebih demokratis dan partisipatoris, karena membantu masyarakat mengembangkan civic skills yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam institusi-institusi demokrasi modern.

Pemahaman tentang demokrasi sebagai instrumen pengembangan desa juga mencerminkan apa yang disebut oleh Mansbridge (1999) sebagai *democratic instrumentalism*, di mana masyarakat memandang demokrasi bukan hanya sebagai nilai intrinsik tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan substantif seperti pembangunan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, Aspinall (2014) mencatat bahwa desentralisasi dan demokratisasi telah menciptakan peluang bagi masyarakat lokal untuk menggunakan mekanisme demokratis untuk mempengaruhi kebijakan pembangunan dan alokasi sumber daya di tingkat daerah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Poopo Barat telah memanfaatkan peluang ini dengan memandang demokrasi sebagai platform untuk mengembangkan potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan kolektif. Namun demikian, efektivitas demokrasi sebagai instrumen pembangunan sangat bergantung pada responsivitas pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat dan kapasitas masyarakat untuk mengorganisir diri dan mengartikulasikan kepentingan mereka secara kolektif, yang memerlukan penguatan kapasitas baik di sisi masyarakat maupun pemerintah.

3. Partisipasi Substantif dan Demokrasi Partisipatoris di Tingkat Lokal

Praktik partisipasi aktif masyarakat Poopo Barat dalam memberikan masukan, arahan, dan menyuarakan pendapat untuk kemajuan desa mencerminkan model demokrasi partisipatoris yang dikembangkan oleh Pateman (1970) dan Barber (1984). Demokrasi partisipatoris menekankan pentingnya keterlibatan langsung warga dalam proses pengambilan

keputusan, bukan hanya melalui perwakilan tetapi juga melalui partisipasi substantif dalam forum-forum deliberatif di tingkat lokal.

Pernyataan Ibu Meyfie Lumintang tentang pentingnya bertukar pikiran dan menyuarakan pendapat dalam mengembangkan potensi desa menunjukkan bahwa masyarakat tidak puas dengan peran pasif sebagai pemilih dalam pemilihan umum, melainkan menginginkan keterlibatan yang lebih aktif dan berkelanjutan dalam proses pemerintahan. Partisipasi substantif ini dianggap lebih bermakna karena memungkinkan warga untuk mempengaruhi kebijakan secara langsung dan melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut (Fung & Wright, 2003).

Praktik partisipasi substantif di Poopo Barat juga dapat dipahami dalam konteks kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa dan menciptakan ruang-ruang partisipasi baru bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan legal bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa melalui mekanisme seperti musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan, dan forum-forum partisipasi lainnya (Antlöv, Wetterberg & Dharmawan, 2016).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Poopo Barat telah memanfaatkan ruang-ruang partisipasi ini untuk menyuarakan aspirasi mereka dan berkontribusi dalam perumusan kebijakan pembangunan desa. Namun demikian, Heller, Harilal, dan Chaudhuri (2007) mengingatkan bahwa efektivitas institusi partisipasi sangat bergantung pada desain institusional, kapasitas fasilitator, dan kesetaraan power relations di antara peserta, sehingga perlu dievaluasi apakah forum-forum partisipasi di Poopo Barat benar-benar inklusif dan memberikan pengaruh substantif terhadap kebijakan atau hanya bersifat konsultatif dan ceremonial.

Meskipun temuan penelitian menunjukkan adanya praktik partisipasi substantif, perlu dipertimbangkan juga tantangan-tantangan yang dapat menghambat partisipasi yang lebih luas dan merata. Gaventa (2004) mengidentifikasi berbagai hambatan partisipasi seperti ketimpangan power relations, keterbatasan kapasitas masyarakat, dan resistensi elite terhadap partisipasi yang dapat mengancam kepentingan mereka.

Dalam konteks Indonesia, Hadiz (2010) mencatat bahwa desentralisasi tidak secara otomatis menghasilkan demokratisasi yang lebih dalam, karena sering kali terjadi rekonfigurasi oligarki di tingkat lokal di mana elite lokal menggunakan mekanisme demokratis untuk mempertahankan dominasi mereka. Untuk memastikan bahwa partisipasi di Poopo Barat tidak hanya terbatas pada elite lokal dan tokoh masyarakat tertentu, diperlukan upaya-upaya afirmatif untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, dan kelompok ekonomi bawah, serta penguatan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan bahwa aspirasi yang disuarakan masyarakat benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan desa.

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Poopo Barat memiliki kesadaran politik yang tinggi tentang pentingnya peran mereka dalam demokrasi politik, yang terbentuk melalui proses sosialisasi politik dan diperkuat oleh modal sosial yang kuat dalam komunitas.

Kesadaran ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi telah terinternalisasi dalam sistem nilai masyarakat sehingga mereka memandang partisipasi politik sebagai hak sekaligus kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjaga keberlanjutan demokrasi.

Masyarakat juga memahami demokrasi politik secara fungsional sebagai instrumen untuk pengembangan desa dan sebagai ruang pembelajaran sosial di mana mereka dapat bertukar pikiran, menyuarakan pendapat, dan berkontribusi dalam pembangunan kolektif. Praktik partisipasi substantif melalui pemberian masukan, arahan, dan penyuaran pendapat menunjukkan bahwa demokrasi di Poopo Barat tidak hanya berlangsung dalam momen-momen elektoral tetapi juga dalam forum-forum deliberatif yang berlangsung secara berkelanjutan.

Namun demikian, untuk memastikan keberlanjutan dan kedalaman demokrasi di Poopo Barat, diperlukan upaya-upaya sistematis untuk mengatasi tantangan-tantangan yang masih ada. Pertama, perlu penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan politik yang kontinu agar kesadaran politik dapat diterjemahkan ke dalam partisipasi yang efektif dan bermakna. Kedua, penting untuk memastikan bahwa institusi-institusi partisipasi yang ada benar-benar inklusif dan memberikan pengaruh substantif terhadap kebijakan, bukan hanya bersifat konsultatif atau ceremonial.

Ketiga, perlu upaya afirmatif untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok marginal agar semua segmen masyarakat dapat terlibat secara setara dalam proses demokrasi. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Poopo Barat dapat menjadi model demokrasi lokal yang kontekstual dan inklusif, yang mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi modern dengan tradisi musyawarah dan gotong royong yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161-183.
- Aspinall, E. (2014). Parliament and patronage. *Journal of Democracy*, 25(4), 96-110.
- Aspinall, E., & Fealy, G. (2003). *Local power and politics in Indonesia: Decentralisation and democratisation*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Barber, B. R. (1984). *Strong democracy: Participatory politics for a new age*. University of California Press.
- Boix, C., & Posner, D. N. (1998). Social capital: Explaining its origins and effects on government performance. *British Journal of Political Science*, 28(4), 686-693.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE handbook of qualitative research*. SAGE Publications.
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative democracy and beyond: Liberals, critics, contestations*. Oxford University Press.
- Easton, D., & Dennis, J. (1969). *Children in the political system: Origins of political legitimacy*. McGraw-Hill.
- Fung, A., & Wright, E. O. (2003). *Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance*. Verso.

- Gaventa, J. (2004). Towards participatory governance: Assessing the transformative possibilities. In S. Hickey & G. Mohan (Eds.), *Participation: From tyranny to transformation?* (pp. 25-41). Zed Books.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.
- Heller, P., Harilal, K. N., & Chaudhuri, S. (2007). Building local democracy: Evaluating the impact of decentralization in Kerala, India. *World Development*, 35(4), 626-648.
- Hidayat, R. (2019). Modal sosial dan partisipasi politik masyarakat di Jawa Barat. *Jurnal Politik Indonesia*, 4(2), 156-173.
- Huntington, S. P. (1991). *The third wave: Democratization in the late twentieth century*. University of Oklahoma Press.
- Mansbridge, J. (1999). On the idea that participation makes better citizens. In S. L. Elkin & K. E. Soltan (Eds.), *Citizen competence and democratic institutions* (pp. 291-325). Pennsylvania State University Press.
- Mill, J. S. (1861). *Considerations on representative government*. Parker, Son, and Bourn.
- Nordholt, H. S., & Van Klinken, G. (2007). *Renegotiating boundaries: Local politics in post-Suharto Indonesia*. KITLV Press.
- Norris, P. (2001). *Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the internet worldwide*. Cambridge University Press.
- Pateman, C. (1970). *Participation and democratic theory*. Cambridge University Press.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods*. SAGE Publications.
- Pratama, A. (2020). Hambatan partisipasi politik masyarakat perdesaan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 2(1), 45-62.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Satriawan, I. (2017). Partisipasi politik masyarakat adat dalam pemilihan kepala daerah di Kalimantan Tengah. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 8(3), 234-251.
- Spradley, J. P. (2016). *Participant observation*. Waveland Press.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.